

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA TELUKJAMBE KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG

Nadhira Nurkhalisa¹, Gun Gun Gumilar², Rachmat Ramdani³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang
email: 1810631180055@student.unsika.ac.id

Abstrak

Peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Namun pada kenyataannya antara pemerintah dan masyarakat saling mempertahankan egonya. Pemerintah merasa mampu membangun wilayahnya tanpa melibatkan masyarakat (partisipasi masyarakat), sementara masyarakat membiarkan tidak mau ambil pusing tentang urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang sejauh mana keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa khususnya Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Peneliti dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa menggunakan model partisipasi yang dikemukakan Cohen dan Uphoff (1977), dengan empat indikator diantaranya Pengambilan keputusan, Pelaksanaan, Manfaat, dan Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa sudah melaksanakan konsep perencanaan pembangunan desa bersama masyarakat di Desa Telukjambe. Hal ini sejalan dengan Pemerintah Desa yang selalu melibatkan partisipasi masyarakatnya dengan cara melakukan musyawarah dalam menetapkan program-program pembangunan, memperhatikan aspirasi masyarakat Desa dalam merencanakan pembangunan Desa.

Kata kunci: Pembangunan Desa, Desa Telukjambe, Partipasi Masyarakat

Abstract

Community participation and involvement in village development is very necessary, as a form of cooperation between the government and the community. However, in reality, the government and society maintain each other's egos. The government feels capable of developing its territory without involving the community (community participation), while the community does not want to bother about government affairs. Therefore, researchers want to know more about the extent of community involvement and participation in village development, especially Telukjambe Village, East Telukjambe District, Karawang Regency. Researchers in analyzing community participation in village development use the participation model proposed by Cohen and Uphoff (1977), with four indicators including Decision Making, Implementation, Benefits and Evaluation. The research results show that the village government has implemented the village development planning concept with the community in Telukjambe Village. This is aimed at the Village Government always involving community participation by holding deliberations in determining development programs, paying attention to the aspirations of the Village community in planning Village development.

Keywords: Village Development, Telukjambe Village, Community Participation

PENDAHULUAN

Berlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43. Pada Pasal 1 (8) bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal 78 (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pada ayat (3) pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial masyarakat Desa. Peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintahan pusat, daerah maupun pedesaan. Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di daerah pedesaan, pemerataan hasil pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak

diperlukan. Penyelenggaraan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dilakukan sebagai partisipasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Namun pada kenyataannya masih banyak masalah terkait lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pembangunan desa salah satunya ialah masalah partisipasi masyarakat desa Telukjambe yang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa masih kurang dilihat dari sikap masyarakat yang acuh dan tidak peduli, masyarakat terlalu mengandalkan pihak pemerintah desa dalam penyelesaian program pembangunan desa. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat terutama masyarakat yang masih produktif yang seharusnya memiliki inovasi dan inisiatif dalam program pembangunan. Pemerintah Desa Telukjambe perlu melakukan langkah strategi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat penting mengingat masyarakat setempatlah yang yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan potensi sumber daya yang ada sehingga memudahkan dalam proses pembangunan guna mengembangkan desa menjadi lebih maju. Semangat membangun desa dengan berlakuknya peraturan desa yang baru tersebut merupakan perwujudan konsep-konsep pembangunan yang bersifat partisipatif dan pemberdayaan yang sudah intens menjadi konsep dan kajian akademis.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi adalah pembangunan dan pemberdayaan secara partisipatif. Mardikanto (2010) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan dan mengajukan kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi secara dinamis, aktual dan potensial dengan berbasis kepada program daerah, regional, dan nasional (Mardikanto, 2010). Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Program Pelatihan dapat dilaksanakan secara partisipatif dengan mempertimbangkan potensi desa mulai dari sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan sumber daya budaya yang telah menjadi bagian yang terintegrasi untuk memajukan desa serta mensejahterakan masyarakat desa. Potensi sumber daya masyarakat dan desa menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan untuk dapat melestarikan dan mengembangkan apa yang sudah menjadi keunikan, kekhasan dan kekuatan modal sosial (social capital) masyarakat desa yaitu karifan local (local wisdom). Pemerintahan mencanangkan berbagai upaya kebijaksanaan dan program pembangunan pedesaan, akan tetapi secara riil dapat kita lihat bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi proses pembangunan. Dapat dikatakan demikian karena peranan pemerintah desa salah satu fungsinya adalah memotivasi dalam pelaksanaan pembangunan dan diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan melalui kebijakan yang diimplementasikan. Melihat dari penelitian sebelumnya yaitu dalam proses pembangunan Desa Sobo didukung oleh penduduk yang berjumlah 1328 jiwa, sumber daya manusia yang baik dengan memiliki perangkat desa lulusan SMA dan sarjana, adanya Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembangdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mengalami kesulitan karena sumber daya manusia masih sangat rendah dan mata pencarian masyarakat sebagian besar petani. Rasa kebersamaan yang tidak dimiliki masyarakat, tidak adanya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah serta kurangnya partisipasi masyarakat yang mengakibatkan pembangunan tidak berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan pemerintah (Se et al., 2021). Penelitian yang berkesinambungan dari (Aja, s. 2022) yang mana dengan jumlah KK 1262 dengan 3650 jiwa dalam pembangunan infrastruktur masih mengalami kendala akibat kurangnya partisipasi masyarakat. Penelitian lainnya dari (Samaun R, Bakri, 2022) terkait upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat desa Oluhuta dimana hasil yang didapatkan terdapat faktor pendukung dan penghambat dari upaya membangun partisipasi masyarakatnya yang diidentifikasi dengan adanya keterbukaan dan komitmen pemerintah dan masyarakat serta hal yang menghambatnya Adanya ketidak cakapan dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitian terkait alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa serta dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan di desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang diharapkan dapat digunakan secara maksimal terhadap realisasi program pembangunan desa.

Pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh adanya partisipasi masyarakat. Segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan peran serta masyarakat, karena masyarakatlah yang dapat mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Masyarakatlah yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayahnya, termasuk didalamnya adalah pembangunan di tingkat desa. Selain itu juga, dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan dan pelaksana program-program pembangunan harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegelolaan pembangunan. Sikap masyarakat amat penting dalam memberikan partisipasi terhadap program-program pembangunan, walaupun terdapat beberapa kemungkinan respon dilapangan. Pada prinsipnya setiap pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat harus selalu ditingkatkan kualitasnya sesuai dengan keinginan klienya (masyarakat) yang ada dibawahnya, akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Untuk memperbaiki mutu pemberdayaan salah satu caranya adalah memenuhi apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Banyak individu-individu dalam organisasi pemerintah yang menafsirkan keluhan dari masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diberikan adalah suatu peluang untuk memperbaiki keadaan dari yang kurang sempurna menjadi sempurna

Peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, hal ini dapat dijadikan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan kerjasama yang baik untuk memajukan daerahnya. Justru bukan sebaliknya, antara pemerintah dan masyarakat saling mempertahankan egonya. Pemerintah merasa mampu membangun wilayahnya tanpa melibatkan masyarakat (partisipasi masyarakat), sementara masyarakat membiarkan tidak mau ambil pusing tentang urusan-urusan pemerintahan. Oleh karna itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang sejauh mana keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa khususnya Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. Dalam mengkaji terkait partisipasi dalam hal ini tentang Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa, maka perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu model atau teori partisipasi. Terdapat banyak model yang dipakai untuk menganalisis sebuah partisipasi, namun dalam hal ini peneliti dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa menggunakan model partisipasi yang dikemukakan Cohen dan Uphoff (1977), dengan empat indikator diantaranya Pengambilan keputusan, Pelaksanaan, Manfaat, dan Evaluasi.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Participatory Learning and Action (PLA). Metode penelitian Participatory Learning and Action (PLA) sebagai salah satu bentuk penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi masalah dan potensi masyarakat serta mendapat pemahaman yang mendalam tentang situasi suatu komunitas. Kemudian komunitas sebagai community worker menganalisis dan mengambil keputusan dari permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut merupakan assessment, proses belajar, mengoptimisasikan aspirasi dan partisipasi dari kondisi atau masalah yang dihadapi dari, dengan dan untuk masyarakat, prinsip utamanya yaitu: (1) Mengutamakan yang kurang beruntung untuk mengetahui realitas masalah yang sebenarnya; (2) Menekankan pada proses assessment sebagai proses pemberdayaan (pembelajaran dan penguatan) untuk masyarakat dan community worker; (3) Prinsip belajar dan menghargai perbedaan. (4) Proses pengecekan ulang atau triangulasi (check and re-check) pada data yang didapatkan baik dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara serta FGD. (5) Pelaksanaan bersifat informal, mengoptimalkan hasil, berkelanjutan, orientasi paraktis dan terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan

pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah (Akbar et al., 2018).

Masalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Yang mana disini masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan harus diikuti sertakan secara aktif dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan serta melestarikan proses pembangunan itu sendiri secara berkesinambungan, oleh karena itu proses pembangunan secara alamiah harus muncul dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan dinikmati oleh masyarakat.

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan dan mengguraikan intepretasi penelitian dari hasil analisis data-data dan informasi yang peneliti peroleh saat melakukan penelitian dan wawancara dengan Kepala Desa Telukjambe, Perangkat desa hingga Masyarakatnya, yang berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Telukjambe. Diperlukannya partisipasi masyarakat serta peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Telukjambe dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, dengan menggunakan tools of analysis konsep analisis partisipasi masyarakat dari teori model partisipasi yang dikemukakan Cohen dan Uphoff (1977), dengan empat indikator diantaranya Pengambilan Keputusan, Pelaksanaan, Manfaat, dan Evaluasi.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa

Dalam pembangunan Desa Telukjambe, peran pemerintah dapat terlihat mulai dari tahap perencanaan pembangunan. Pemerintah Desa mengadakan pertemuan untuk dapat mendiskusikan terkait perencanaan apa yang akan diajukan dalam pembangunan desa. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Dari berbagai permasalahan masyarakat yang terkumpul, pemerintah melakukan pengkajian sehingga didapat peta permasalahan. Disini peran pemerintah sebagai penentu arah mulai terlihat jelas. Dari peta permasalahan tersebut Pemerintah Desa Telukjambe memberikan poin-poin masalah yang sebaiknya diprioritaskan. Poin tersebut nantinya dijadikan untuk pedoman arah pembangunan. Seperti yang telah diketahui, bahwa Partisipasi dalam pengambilan keputusan atau perencanaan ini merupakan peran aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan apa yang akan diputuskan yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang bersangkutan dan juga keterlibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek secara terencana atas keputusan bersama melalui musyawarah antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal tersebut masyarakat dibebaskan untuk berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik tentang perencanaan pembangunan dengan cara melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan antara masyarakat dan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan suatu informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan jika yang terlibat didalamnya saling mendukung dan berkerjasama dengan baik. Jika saja ada salah satu pihak yang seharusnya terlibat dalam suatu perencanaan tidak melaksanakan atau tidak terlibat, otomatis perencanaan tidak akan terlaksana dengan baik dan akan mempengaruhi tahap proses pembangunan lain yang telah direncanakan.

Pada hasil penelitian bahwa pemerintah desa setiap mempunyai atau merumuskan kegiatan di Desa Telukjambe mengenai peraturan, kegiatan maupun pembangunan di Desa Telukjambe perangkat desa selalu melibatkan masyarakat Desa Telukjambe karena hal itu sudah tercantum pada aturan bahwasannya ketika diadakannya MusrembangDes yang membahas tentang kegiatan pembangunan Desa, perangkat desa ini pun melibatkan kelompok-kelompok di masyarakat terutama RT, RW, Kelompok marginal, kelompok lansia, maupun tokoh agama dan Karang Taruna. Kelompok-kelompok yang dilibatkan inilah yang membantu mengambil keputusan di Desa Telukjambe, sehingga peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan itu sudah berjalan dengan baik di Desa Telukjambe ini. Akan tetapi partisipasi masyarakat Dusun Sukakarya yang merupakan bagian wilayah dari Desa Telukjambe ini kurang menyadari bahwa pentingnya perencanaan pembangunan tersebut. Terlebih lagi pada 3 tahun kebelakang semenjak adanya pandemi covid 19 itu hal-hal yang berkaitan dengan pertemuan secara langsung antara pemerintah desa dan masyarakat seperti pada kegiatan MusrembangDes belum bisa berjalan seperti biasanya. Sehingga komunikasi yang hanya berjalan via online saja seperti contoh pada whatsapp pribadi maupun group sehingga hal ini menjadi sangat tidak efektif dan banyak menimbulkan miskomunikasi antara pemerintahan Desa dan Masyarakat Dusun Sukakarya. Masyarakat pun menuturkan bahwa dari pihak masyarakat Dusun Sukakarya sudah pernah mengajukan pembangunan drenase kepada pemerintah Desa, akan tetapi sampai saat ini hal

tersebut belum terealisasi, sudah disetujui oleh pihak desa namun belum ada tindak lanjut dan komunikasi lagi. Hal ini disebabkan oleh pemerintah desa yang saat ini mengalokasikan anggaran kebutuhan masyarakat ke covid 19 dan pembangunan kantor desa Telukjambe. Walaupun ada Grup yang dibuat terkait dengan Desa dan RT kurang efektif karena tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan tujuannya.

Pembangunan dapat terlaksana sesuai rencana dan kebutuhan jika adanya kerjasama dan komunikasi baik antara masyarakat dan pemerintah, pemerintah berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat dan masyarakat berperan sebagai sumber informasi pembangunan yang akan direncanakan berdasarkan keputusan bersama. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan suatu informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan jika yang terlibat didalamnya saling mendukung dan berkerjasama dengan baik. Jika saja ada salah satu pihak yang seharusnya terlibat dalam suatu perencanaan tidak melaksanakan atau tidak terlibat, otomatis perencanaan tidak akan terlaksana dengan baik dan akan mempengaruhi tahap proses pembangunan lain yang telah direncanakan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan masyarakat dapat diajak untuk berpartisipasi dengan jalan menyumbangkan fisik dan tenaga. Partisipasi masyarakat seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dari upaya pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini harus melibatkan semua pihak, harus bekerjasama dan bertanggungjawab agar semua tujuan yang telah direncanakan dan disepakati sebagai hasil dari keputusan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Dalam program pembangunan desa, pemerintah desa harus mengikut sertakan masyarakat, karena masyarakat bukan hanya dapat menikmati hasil pembangunan saja, akan tetapi masyarakat pun ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dapat berhasil sesuai target atau tidak. Disamping itu, agar terciptanya suasana kebersamaan dan keterbukaan, sehingga berharap agar pembangunan yang sudah direalisasikan dapat di pertahankan dan ditingkatkan. Mengingat pentingnya peran Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan baik itu fisik maupun non fisik di Desa Telukjambe Karawang, perlu adanya kerja nyata yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan, disamping itu kerja sama aparat Desa dengan masyarakat sangat diperlukan.

Oleh sebab itu pemerintahan desa harus berperan secara maksimal dalam meningkatkan pembangunan di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Karawang. Pada dasarnya partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan ini lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam bentuk materi maupun waktu dan tenaga. Umumnya bersifat pada wujud yang terlihat jelas seperti partisipasi dalam bentuk modal maupun sumbangan uang, sumbangan tenaga pikiran yang diaplikasikan dalam pelaksanaan dan implementasi pembangunan. Sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan, masyarakat dalam hal ini memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan keberhasilan dalam pembangunan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ini pasti melibatkan peran pemerintah desa, dimana dalam hal ini Kepala Desa memiliki peran untuk mempengaruhi masyarakat agar mau ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Jika peran serta masyarakat tinggi dalam pelaksanaan pembangunan otomatis proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan didesa akan berjalan dengan lancar.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Telukjambe mempunyai tim TPK yang dimana tim TPK ini merupakan tim pembangunan desa, 16 tim pembangunan desa ini bekerjasama, dan setiap kali ada pembangunan di Desa Telukjambe itu di swakelola kan kepada masyarakat. Peran aktif dari masyarakat Desa Telukjambe sendiri sangatlah antusias sekali dan pemerintah desa juga memberdayakan warga sekitar untuk ikut membantu pelaksanaan pembangunan di Desa Telukjambe terutama dalam kebijakan-kebijakan pun pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat nya. Jadi tidak hanya dalam kebijakan saja, akan tetapi pada pelaksanaannya pun masyarakat Desa Telukjambe ini ikut berpartisipasi. Dari segi partisipasi masyarakat bukan hanya terkait pembangunan saran dan prasarana namun juga terkait pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, pengembangan kelembagaan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dari segi pembangunan desa

terkait infrastruktur masyarakat sudah cukup berpartisipasi namun masih ada saja masyarakat yang acuh, misal dalam proses pemabangunan kantor desa hanya sedikit masyarakat yang bertanya dan menyikapi kondisi dari kantor desa, namun secara keseluruhan terkait pembangunan infrastruktur dalam lingkup dusun masing-masing sudah cukup baik partisipasi masyarakat.

Dari segi partisipasi masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat dari hasil wawancara diketahui masyarakat cukup aktif dalam proses pemberdayaan melalui LPM yang dilakukan desa telah membentuk kegiatan masyarakat seperti misalnya terkait dalam bidang kesehatan yaitu posyandu, masyarakat menjadi mandiri dalam mengelola dan mengurus pelaksanaan pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil dan balita, bidang ekonomi, melalui UMKM masyarakat dapat membantu perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Telukjambe yang diakomodir dalam usaha pengolahan kripik singkong. Bidang pertanian masyarakat Telukjambe dapat mengelola dan membudidayakan tanah secara mandiri, dan bisa merasakan hasil panennya untuk masyarakat sendiri, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan. Kemudian dalam bidang peternakan, masyarakat dapat mendayagunakan ternak-ternak yang diberikan sebagai program pemberdayaan masyarakat seperti hewan qurban, yang nantinya akan dapat diperjual belikan ketika hari raya qurban dan berharap mendapatkan hasil atas apa yang dikelola oleh masyarakat. Sedangkan dalam bidang pendidikan, masyarakat belum merasakan pengaruh yang signifikan, dikarenakan tidak meratanya program pelatihan dan sosialisasi atas informasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengaruh yang banyak dirasakan oleh masyarakat adalah membuat masyarakat menjadi mandiri dan dapat mengandalkan apa yang diberdayakan oleh masyarakat itu sendiri. Walaupun masyarakat masih merasakan banyak kekurangan atas fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan, tetapi masyarakat dapat memikirkan dan memutuskan, serta melaksanakan sendiri atas program pemberdayaan yang diberikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Telukjambe.

Pengembangan ekonomi masyarakat, Bumdes yang dibentuk oleh pemerintah desa juga terdapat keterlibatan masyarakat, walaupun Bumdes yang ada hanya dapat menysar desa yang terdekat dengan kantor desanya namun masyarakat yang terdekat umumnya berpartisipasi membeli produk-produk dalam Bumdes, serta ikut dalam produksi madu klanceng dan palet. Gotong-royong serta kesadaran dan solidaritas masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan sangat dibutuhkan. Karena tanpa adanya gotong-royong dari masyarakat itu sendiri, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Pembangunan yang baik ialah pembangunan yang tumbuh dan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh masyarakat yang nantinya akan merasakan dampak positif dari hasil pembangunan tersebut. Penyebab lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ialah rasa kurang peduli masyarakat terhadap pembangunan desa. Dapat dilihat juga dari kepribadian masing-masing masyarakat, karena partisipasi ini dapat terjadi dari rasa peduli, dari hati dan pikiran seseorang untuk berpikir, apakah harus dan tidak harus membantu dalam gotong-royong pembangunan desa.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Manfaat Pembangunan Desa

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan pembangunan yang bisa dicapai. dari segi kualitas keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak. Masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil pembangunan desa yang telah ditetapkan, oleh karena itu masyarakat harus ikut andil dalam setiap rencana yang telah dibuat oleh pemerintah. Pengambilan manfaat dalam pembangunan ini harus disalurkan dan dirasakan oleh orang-orang yang ikut berpartisipasi dan bekerjasama didalamnya. Oleh karenanya, pemerintah desa harus menkaji ulang siapa saja orang-orang yang harus menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat pembangunan di Desa Telukjambe menunjukkan bahwa sebagian masyarakat dapat menikmati dan merasakan hasil dan manfaat dari pembangunan desanya. Selain itu masyarakat juga bisa merasakan kenyamanan yang ada di desa tersebut dengan sesuai dan harapan dari masyarakat itu sendiri. Namun dalam beberapa hal terkait pembangunan yang dibutuhkan masyarakat seperti drenase ataupun lainnya masih belum dapat terpenuhi karena dalam prosesnya, rencana pembangunan saat ini telah terfokus kepada pembangunan kantor desa sebab memang urgent untuk dilakukan perbaikan demi menciptakan tempat kerja dan pelayanan yang sesuai.

Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pembangunan Desa

Setelah perencanaan dan pelaksanaan, tahap selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi pembangunan. Agak sedikit berbeda dengan tahapan sebelumnya, dalam tahap ini pemerintah lebih mendominasi. Dominasi ini terutama dapat dilihat dalam pengawasan pembangunan fisik. Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Telukjambe Kabupaten Karawang, menunjukkan hasil bahwa Pemerintah Desa Telukjambe, membentuk tim pengawas yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat untuk melaporkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, pembangunan. Peran masyarakat memang masih terlihat yakni sebagai pengawas langsung. Namun dalam menentukan evaluasi, pemerintah lebih dominan. Hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah membentuk tim audit internal jika terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan. Dari temuan di lapangan, ada semacam garis komando dari atasan (pemerintah) kepada bawahan (masyarakat). Adanya instruksi untuk membentuk tim pengawas adalah salah satu fakta bahwa dalam pengawasan pembangunan, pemerintah Desa Telukjambe lebih mendominasi. Dalam kerjasama ini, pihak-pihak yang bekerjasama sebenarnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan salah satu pihak belum memahami makna dan tujuan kerjasama yang dilakukan.

Partisipasi dalam evaluasi hasil pembangunan ini lebih pada penilaian hasil pembangunan dan pemanfaatan pembangunan yang sedang berjalan. Tujuan dari evaluasi itu juga dapat dijadikan sebagai suatu bahan pembelajaran dan bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembangunan kedepannya. Untuk melakukan penilaian hasil pembangunan yang di Desa merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah bagi pemerintah desa. Penilaian ini juga memerlukan waktu yang cukup lama, dengan berbagai macam pertimbangan. Untuk melakukan evaluasi hasil pembangunan tersebut biasanya Kepala Desa sering kali melakukan pertemuan dan musyawarah bersama masyarakat untuk membahas dan mengevaluasi secara bersama hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Peran BPD (Badan Permusyawawarata Desa cukup berperan dalam pelaksanaan evaluasi terkait pembangunan. Segala hambatan dan kekurangan yang ada pada program sebelumnya, akan di adukan terhadap BPD dan BPD akan menjadi perantara antara pihak masyarakat dan juga pihak pemerintah Desa. Maka dari itu dalam membantu tugas Kepala desa BPD akan bekerja sama dengan kepala desa sebagai motivator sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa sangat diperlukan untuk mendukung program pemerintah.

Faktor Penghambat dan Pendukung kerjasama Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Dalam menengahi konflik, tentu dibutuhkan komunikasi yang efektif. Pemerintah Desa Telukjambe melakukan pendekatan manusiawi pada pihak-pihak yang berkonflik salah satunya dengan mengunjungi rumahnya. Dengan begitu, masyarakat (pihak yang berkonflik) merasa diperhatikan dengan baik sehingga pemerintah tidak mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan kembali pihak yang berkonflik tersebut. Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum kerjasama yang dibangun antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Telukjambe. Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa secara umum kerjasama yang dibangun antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam kerjasama pemerintah-masyarakat dalam pembangunan desa adalah adanya pihak-pihak dari masyarakat yang teguh pada pemikirannya dalam penentuan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, dalam hal kebersihan lingkungan dalam temuan disebutkan bahwa meski tempat sampah sudah banyak disediakan namun kebersihan lingkungan masih belum sepenuhnya baik. Selain itu, inisiatif masyarakat untuk mengolah sampah masih sangat kurang. Masyarakat lebih memilih membuang sampah daripada mengolahnya, kesadaran masyarakat masih minim. Sedangkan faktor penghambat dari pihak pemerintah lebih pengolahan sampah masih belum maksimal membuat beberapa pihak masih belum terintegrasi dengan baik dalam mengolah sampah di tempat pembuangan sampah desa. kepada paradigma pemerintah sendiri yang sedikit banyak masih terpengaruh paradigma lama bahwa masyarakat merupakan objek pembangunan. Meski tidak penuh, paradigma ini terlihat dalam pengawasan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Telukjambe dimana masyarakat lebih cenderung dipandang sebagai bawahan untuk menerima arahan Pemerintah Desa dalam melakukan pengawasan pembangunan. Selain itu, koordinasi Pemerintah Desa dalam hal. Kemudian faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat masih kurang, karena komunikasi yang dijalin antara masyarakat dan pemerintah desa masih kurang, masyarakat merasa hanya masyarakat tertentu saja yang bisa untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa

Telukjambe. Kondisi desa dan masyarakat yang sudah masuk terhadap era modern pun menjadi penghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pun cukup minim untuk melaksanakan pembangunan yang ada di Desa Telukjambe.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah desa sudah melaksanakan konsep perencanaan pembangunan desa bersama masyarakat di Desa Telukjambe. Hal ini tujukan dengan Pemerintah Desa yang selalu melibatkan partisipasi masyarakat nya dengan cara melakukan musyawarah dalam menetapkan program-program pembangunan, memperhatikan aspirasi masyarakat Desa dalam merencanakan pembangunan Desa, berusaha untuk memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui perencanaan pembangunan Desa dan masyarakat di beri kebebasan untuk mengemukakan aspirasi atau pikiran mengenai pembangunan Desa yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang desa Telukjambe dari mulai pembangunan fisik infrastruktur sudah cukup baik walaupun secara keseluruhan belum cukup baik, dari segi partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan sangat antusias mengikuti program yang ditawarkan membantu pemerintah desa menjalankan programnya, dari segi pelaksanaan Bumdes sendiri partisipasi masyarakat dirasakan cukup baik dengan membeli produk yang ditawarkan pihak Bumdes, walaupun belum merata partisipasi nya namun tetap ada. Dusun sukakarya yang merupakan bagian wilayah desa Telukjambe terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunannya dinilai masih rendah. Hal ini terlihat dengan ditemukannya kendala seperti kesadaran masyarakatnya untuk ikut bergotong-royong dalam pembangunan yang sudah direncanakan bersama pemerintah desa. Untuk evaluasi hasil pembangunan, masyarakat Desa Telukjambe juga begitu antusias mengingat segala bentuk pembangunan yang dilakukan tepat dan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Faktor penghambatnya adalah minimnya kesadaran sebagian masyarakat pada bentuk partisipasi yang mereka lakukan padahal partisipasi merupakan salah satu cara masyarakat membantu pemerintah dalam memajukan desanya serta masih adanya anggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, R. M. (2021). PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Baliara Selatan, Kabupaten Bombana). *Nuevos sistemas de comunicación e información*, 3(1), 2013–2015.
- Adisasmitha, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Penerbit Pustaka Utama.
- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Dwiningrum, S. I. A. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar.
- Hafsah, M. J. (2000). *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Pustaka Sinar Harapan.
- Ibrahim, J. (2006). *Hukum Organisasi Perusahaan*. PT Refika Aditama.
- Lukman, H. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesia*, 2(2), 43–53.
- Mardikanto, T. (2010). *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Fakultas Pertanian UNS dengan UNS press.
- Ndraha, T. (1990). *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta.
- Prasojo, R. A. (2015). PERAN PEMERINTAH-MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SEDATIGEDE KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO. *JKMP*, 3(1), 49–64.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18-33.
- Se, H., Mea, M. H. C. D., & Sedi, M. E. (2021). Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Sobo Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada. *ASSETS*, 11(1), 37–52.

- Siagian, S. P. (2012). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. PT. Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Slamet. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa